

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/psnp.15309>

Adaptasi Nelayan Selat Lampa terhadap Mekanisme Penarikan PNBP Pasca Produksi

Adaptation of Selat Lampa Fishermen to the Mechanism of Post-Production Non-Tax State Revenue (PNBP) Collection

M. Yogi Syafutra¹, Aman Saputra², Jerry Hutajulu³, Hery Choerudin⁴, Eli Nurlaela^{5*}

¹Pelabuhan Perikanan Baran, Meral, Kab. Karimun, Kep. Riau

²Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

³Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

⁴Institut Pertanian Bogor, Jl. Dramaga, Bogor, Jawa Barat

⁵Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

*E-mail: elimumtaza@gmail.com

ABSTRAK

Penangkapan Ikan Terukur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Namun, salah satu kendala yang menyebabkan ketidaksetujuan nelayan adalah dampak finansial akibat penarikan PNBP pasca produksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis adaptasi nelayan terhadap mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi dengan pendekatan deskriptif. Hasil survei terhadap 38 nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini. Semua responden (100%) mengetahui mekanisme pembayaran, dengan 8% selalu tepat waktu dan 92% sering tepat waktu. Sebanyak 97% responden memahami mekanisme pembayaran, sementara 3% lainnya belum memahaminya. Sebagian besar nelayan tidak mengalami kendala dalam pembayaran, dengan 31,6% bersikap netral, 34,2% menilai sangat mudah, dan 34,2% menyatakan cukup mudah. Dari segi keadilan, 78,9% menilai sangat adil, 15,8% menyatakan adil, dan 5,3% netral. Terkait adaptasi terhadap sistem baru, 84,2% tidak mengalami kendala, meskipun ada beberapa yang melaporkan masalah teknis pada program atau tautan pembayaran. Selain itu, 81,6% responden menganggap pungutan ini sangat berpengaruh pada produktivitas mereka. Sebagian besar nelayan (65,8%) memperoleh informasi dari petugas pelabuhan, sementara hanya 34,2% mendapat informasi dari organisasi nelayan. Mayoritas nelayan (97,4%) merasa didukung oleh pemerintah. Usulan terbanyak meliputi peningkatan fasilitas pelabuhan, pengurangan persentase PNBP, dan perbaikan harga acuan ikan.

Kata kunci: Kebijakan, Perikanan Tangkap, Penangkapan ikan terukur

ABSTRACT

Measured Fishing aims to enhance the welfare of fishermen and communities dependent on the fisheries sector. However, one of the obstacles causing fishermen's disapproval is the financial impact resulting from post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) collection. This study seeks to analyze fishermen's adaptation to the post-production PNBP payment mechanism through a descriptive approach. A survey of 38 fishermen at Selat Lampa Fisheries Port indicated a positive adaptation to the new process. All respondents (100%) were aware of the payment mechanism, with 8% consistently on time and 92% often timely in their payments. Moreover, 97% understood the payment procedure, while 3% still lacked comprehension. Most fishermen encountered no difficulties in payment, with 31.6% remaining neutral, 34.2% finding it very easy, and another 34.2% reporting it as relatively easy. Regarding fairness, 78.9% rated the system as highly fair, 15.8% as fair, and 5.3% as neutral. In adapting to the new system, 84.2% experienced no significant issues, although some reported technical problems with the program or payment links. Additionally, 81.6% of respondents perceived this levy as significantly impacting their productivity. A majority (65.8%) received information about the policy from port officials, while only 34.2% learned from fishermen's organizations. Most fishermen (97.4%) felt supported by the government. Key suggestions included enhancing port facilities, reducing the PNBP rate, and improving fish price benchmarks.

Keywords: Capture Fisheries, Measurable Fishing Practices, Policy

Pendahuluan

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Nurlaela, 2023; Trenggono, 2023). Dalam kebijakan ini, mekanisme penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi diterapkan sebagai bentuk kontribusi finansial nelayan terhadap negara. Namun, pemberlakuan PNBP pasca produksi ini masih menjadi kendala di kalangan nelayan karena beban finansial yang ditimbulkannya, yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. PNBP, yang merupakan sumber pendapatan bagi negara, sering kali dianggap sebagai beban tambahan bagi nelayan yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pendapatan nelayan, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan mereka (Luhur & Tajerin, 2016; Ramli, 2021). Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat PNBP dan faktor eksternal lainnya, seperti kenaikan harga bahan bakar, semakin memperberat beban finansial nelayan (Mira et al., 2016). Kenaikan harga bahan bakar, misalnya, tidak hanya meningkatkan biaya operasional tetapi juga mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak langsung pada penjualan produk perikanan (Mira et al., 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi juga berperan dalam menentukan pendapatan nelayan. Misalnya, karakteristik sosial-ekonomi nelayan, seperti pendidikan dan akses terhadap informasi, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kebijakan baru seperti PNBP (Nababan et al., 2017; Ridha, 2017). Selain itu, kontribusi perempuan dalam keluarga nelayan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, meskipun kontribusi ini sering kali tidak diakui secara resmi (Firdaus & Rahadian, 2016; Puspitawati et al., 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada implementasi kebijakan PIT secara umum, namun belum banyak yang membahas aspek adaptasi nelayan terhadap mekanisme PNBP pasca produksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi nelayan dalam menghadapi mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi, khususnya di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggali tingkat pemahaman, kemudahan akses, dan persepsi keadilan dari nelayan terhadap

mekanisme tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan pemahaman yang lebih dalam mengenai kesiapan dan adaptasi nelayan terhadap kebijakan fiskal dalam sektor perikanan, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan kebijakan PNBP pasca produksi agar lebih diterima oleh komunitas nelayan, sehingga dampaknya pada kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Bahan dan Metode

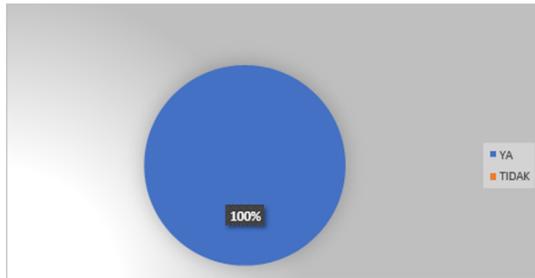
Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Februari hingga Mei 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan observasi lapangan sebagai metode pengumpulan data. Metode survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden terpilih, yaitu nelayan yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Data yang diperoleh dari survei dan observasi lapangan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar kerja, alat tulis, kamera, dan kuisisioner.

Hasil dan Pembahasan

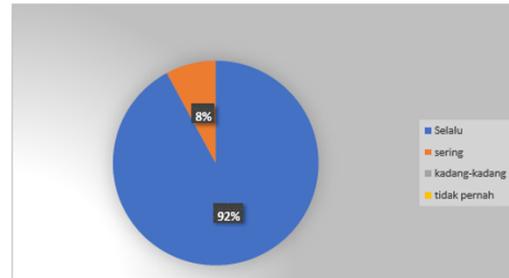
Hasil

Pengetahuan dan kesadaran nelayan di PP selat lampa terhadap mekanisme pembayaran pungutan hasil perikanan pasca produksi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pada umumnya, nelayan di Natuna ini sudah memahami aturan dan prosedur yang berlaku, agar dapat mematuhi dan mengoptimalkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pungutan, cara perhitungan pungutan, serta jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Selain itu, kesadaran akan pentingnya mekanisme pembayaran ini juga harus ditanamkan, agar nelayan dapat melihat manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pemahaman dan kesadaran para nelayan di PP Selat Lampa mengenai mekanisme pembayaran pungutan hasil perikanan pascaproduksi merupakan elemen penting bagi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Pada umumnya, nelayan di Natuna telah memahami peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan memaksimalkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis pungutan, cara perhitungan pungutan, serta jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh

pihak berwenang. Di samping itu, kesadaran akan pentingnya mekanisme pembayaran ini juga perlu dibangun, sehingga nelayan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.



Gambar 1 Survey Mekanisme Pembayaran PNBP Pasca Produksi



Gambar 2 Ketepatan Waktu Pembayaran PNBP Pasca Produksi

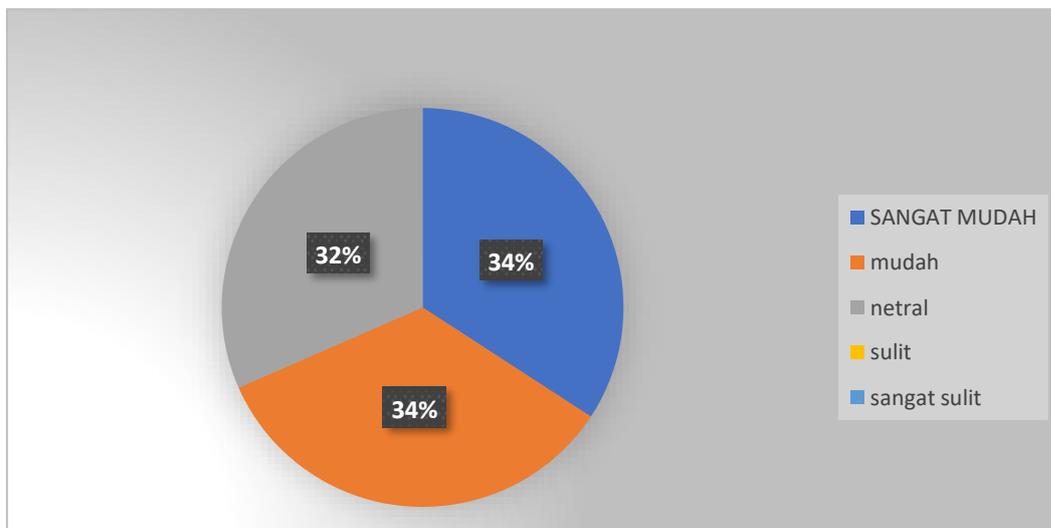
Gambar 1 menunjukkan hasil survei terkait pengetahuan nelayan mengenai mekanisme pembayaran pungutan hasil perikanan pasca produksi. Gambar 1 menyajikan persentase responden yang telah memahami sistem pungutan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa 100% dari responden menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pungutan pascaproduksi ini.

Pemahaman dan kesadaran nelayan terhadap kebijakan pungutan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pengelolaan perikanan. Saat para nelayan mengetahui aturan dan prosedur pembayaran, mereka lebih cenderung mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kesejahteraan ekosistem dan komunitas nelayan itu sendiri. Hasil penelitian ini mencerminkan kesadaran tinggi para nelayan di PP Selat Lampa, yang dapat menjadi contoh positif bagi komunitas nelayan lainnya untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan serupa di sektor perikanan.

Gambar 2 menggambarkan data ketepatan waktu nelayan dalam membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas nelayan, yaitu 92%, selalu membayar tepat waktu. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi di antara nelayan di Selat Lampa terhadap kewajiban pembayaran PNBPs. Sementara itu, sebesar 8% dari nelayan tercatat sering membayar tepat waktu, meskipun dengan frekuensi yang tidak seketat kelompok mayoritas. Ketidakhadiran kategori

“Kadang-kadang” dan “Tidak Pernah” dalam data menunjukkan bahwa tidak ada nelayan yang mengabaikan kewajiban ini sepenuhnya atau membayar dengan ketepatan yang sangat rendah. Fenomena ini bisa jadi dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan yang ketat di pelabuhan atau adanya sanksi administratif yang efektif dalam mendorong kedisiplinan.

Gambar 3 menunjukkan persepsi nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna, mengenai tingkat kemudahan dalam melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Persepsi ini mencerminkan pengalaman nelayan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat ketepatan waktu pembayaran. Analisis ini penting untuk memahami seberapa efektif sistem pembayaran PNBP diterapkan serta apakah ada hambatan yang dihadapi nelayan dalam prosesnya.

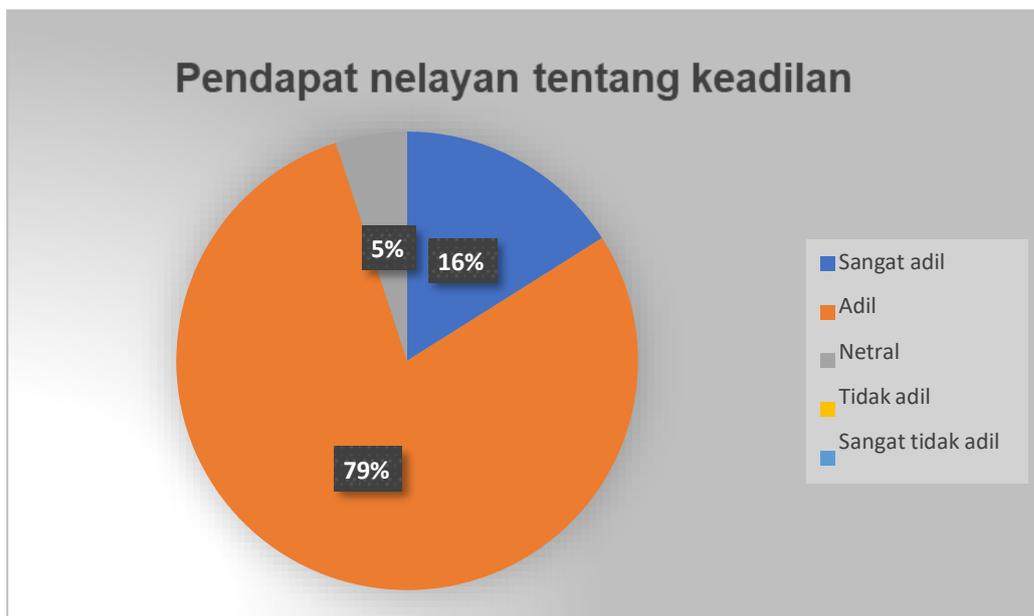


Gambar 3. Kemudahan Pembayaran PNBP Pasca Produksi

Berdasarkan Gambar 3, persepsi nelayan mengenai kemudahan pembayaran PNBP Pasca Produksi terbagi ke dalam tiga kategori utama. Mayoritas responden merasa bahwa proses pembayaran tergolong "Sangat Mudah" (34%) atau "Mudah" (34%), yang menunjukkan bahwa dua pertiga dari responden tidak menghadapi kesulitan berarti dalam proses ini. Persepsi kemudahan ini bisa menjadi indikator bahwa sistem pembayaran PNBP di Pelabuhan Selat Lampa telah didesain untuk memfasilitasi nelayan dalam memenuhi kewajiban mereka dengan efisien. Kemudahan akses, dukungan petugas, dan transparansi prosedur bisa menjadi beberapa faktor yang berkontribusi pada persepsi ini.

Sebaliknya, terdapat 32% nelayan yang bersikap "Netral," menunjukkan bahwa sepertiga dari mereka mungkin mengalami sedikit hambatan, meskipun tidak terlalu signifikan, atau menganggap prosesnya biasa saja tanpa ada kemudahan atau kesulitan yang mencolok. Tidak ada responden yang melaporkan bahwa pembayaran tersebut sulit atau sangat sulit, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar dari mereka dapat menavigasi sistem pembayaran dengan baik.

Gambar 4 menampilkan pendapat nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna, terkait keadilan dalam sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Persepsi tentang keadilan ini penting untuk dievaluasi, karena pandangan nelayan mengenai aspek keadilan dalam sistem pembayaran akan memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. Dengan menilai tanggapan mereka, pihak terkait dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada, memastikan bahwa prosedur pembayaran berjalan secara transparan dan adil bagi seluruh pihak.



Gambar 4. Pendapat Nelayan tentang Keadilan dalam Pembayaran PNBP Pasca

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan, yaitu sebanyak 79%, merasa bahwa sistem pembayaran PNBP Pasca Produksi di pelabuhan tersebut "Adil." Hal ini menandakan bahwa mayoritas nelayan memiliki persepsi positif terhadap keadilan dalam kebijakan ini. Tingginya tingkat kepuasan ini dapat mendukung kelancaran proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban ini. Sebanyak 16% nelayan merasa bahwa sistem tersebut "Sangat Adil," yang memperkuat indikasi bahwa

sebagian besar nelayan percaya terhadap sistem yang diterapkan. Di sisi lain, hanya 5% yang bersikap "Netral," menunjukkan bahwa sebagian kecil dari responden merasa bahwa sistem ini berjalan cukup baik tanpa kesan keadilan atau ketidakadilan yang mencolok. Tidak adanya responden yang memilih kategori "Tidak Adil" atau "Sangat Tidak Adil" memperkuat pandangan bahwa mayoritas besar nelayan merasa adil dengan sistem pembayaran yang berlaku.

Gambar 5 menampilkan tanggapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna, mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Persepsi tentang kesulitan dalam pembayaran penting untuk dievaluasi, karena hambatan dalam proses ini dapat memengaruhi ketepatan waktu dan kepatuhan nelayan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Dengan mengetahui jenis dan frekuensi kesulitan yang dihadapi, pihak pelabuhan dapat merancang solusi yang efektif untuk mempermudah proses pembayaran bagi para nelayan.



Gambar 5. Pendapat Nelayan Tentang Kesulitan Dalam Proses Pembayaran

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan, yaitu 84%, menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam proses pembayaran PNBP Pasca Produksi. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan di pelabuhan tersebut telah berhasil menyediakan prosedur yang mudah diakses dan minim hambatan bagi para nelayan. Ini bisa mencerminkan efektivitas dari sistem yang diterapkan, kemungkinan dengan dukungan teknologi yang mudah digunakan, prosedur yang

sederhana, atau bantuan langsung dari petugas di pelabuhan. Sebaliknya, 16% nelayan melaporkan mengalami kesulitan. Kesulitan ini mungkin berkaitan dengan akses internet, keterbatasan pengetahuan teknologi, atau kendala lainnya yang terkait dengan sistem pembayaran elektronik.

Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran nelayan terhadap peraturan dan mekanisme pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pungutan hasil perikanan (Wijaya, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan mekanisme pembayaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, termasuk nelayan (Wijaya, 2023). Selain itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme ini dapat membantu nelayan dalam merencanakan keuangan mereka, sehingga mereka dapat mengelola pendapatan dengan lebih efektif (Vibriyanti, 2019).

Kedua, kesadaran nelayan tentang dampak dari pungutan hasil perikanan juga berperan penting dalam keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur. Nelayan yang memahami bahwa pungutan ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan cenderung lebih mendukung kebijakan tersebut (Megawanto et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa ketika nelayan menyadari manfaat jangka panjang dari pungutan yang dibayarkan, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan, mereka lebih termotivasi untuk mematuhi kebijakan yang ada (Mustaruddin et al., 2021). Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai manfaat dari pungutan hasil perikanan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran nelayan (Choirunnisa et al., 2022).

Selanjutnya, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan nelayan terhadap akses modal dan jaringan sosial dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mematuhi mekanisme pembayaran (Amriwan, 2021). Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan peningkatan akses informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan (Tasabaramo, 2023). Dengan meningkatkan kapasitas nelayan dalam hal pengetahuan dan keterampilan, diharapkan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan

sumber daya perikanan dan mematuhi kebijakan yang ada (Sudarmo et al., 2016).

Dari Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Perikanan Selat Lampa telah berhasil menciptakan sistem yang mempermudah nelayan dalam pembayaran PNB. Namun, untuk meningkatkan pengalaman nelayan yang bersikap netral, pihak pelabuhan mungkin perlu mempertimbangkan peningkatan layanan atau penyederhanaan prosedur lebih lanjut agar seluruh nelayan dapat merasakan kemudahan yang optimal dalam proses pembayaran ini. Kualitas pelayanan jasa pelabuhan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan keadilan sosial (Zakaria, 2024). Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur pelabuhan, seperti penambahan fasilitas pendaratan dan pengolahan hasil tangkapan, dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nelayan dalam melakukan transaksi (Prasetyo et al., 2022).

Selain itu, pelabuhan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat langsung kepada nelayan (Marwah, 2021). Penyederhanaan prosedur pembayaran PNB juga sangat penting. Proses yang rumit dan berbelit-belit dapat menjadi penghalang bagi nelayan untuk mematuhi kewajiban pembayaran mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh nelayan (Safira et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pelabuhan cenderung lebih siap dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur yang ada (Safira et al., 2022).

Selanjutnya, pentingnya komunikasi yang efektif antara pihak pelabuhan dan nelayan tidak dapat diabaikan. Melalui komunikasi yang baik, nelayan dapat menyampaikan keluhan dan masukan mengenai layanan yang ada, sehingga pihak pelabuhan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan (Sriyono & Dewi, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan efektivitas layanan publik (Azizah, 2024). Oleh karena itu, pelabuhan perlu membangun saluran komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan nelayan.

Secara keseluruhan, data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa sistem pembayaran PNB Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa dipandang adil oleh mayoritas nelayan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan ini, pihak pelabuhan perlu terus mempertahankan transparansi, konsistensi, dan mungkin

memberikan sosialisasi lebih lanjut agar persepsi keadilan tetap terjaga di masa mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Maharani, 2023).

Meskipun hanya sebagian kecil dari responden yang merasakan hambatan sebagaimana tersaji dalam Gambar 5, hal ini tetap penting untuk diperhatikan guna memastikan bahwa semua nelayan dapat menyelesaikan pembayaran mereka tanpa kendala, terutama jika sistem pembayaran yang digunakan berbasis digital. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa sudah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari sebagian besar nelayan. Namun, pihak pelabuhan perlu memberikan perhatian khusus kepada 16% nelayan yang masih merasakan kesulitan, mungkin dengan cara memberikan pelatihan, menyediakan akses informasi tambahan, atau memastikan adanya bantuan teknis untuk mereka yang mengalami masalah.

Simpulan

Hasil survei terhadap nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan baik terhadap sistem pembayaran PNBP yang baru. Seluruh responden mengetahui mekanisme pembayaran, dengan sebagian besar membayar tepat waktu. Tingkat pemahaman terhadap mekanisme pembayaran juga tinggi (97%), dan sebagian besar nelayan tidak mengalami kendala berarti dalam proses pembayaran, yang umumnya dinilai mudah atau sangat mudah. Dari segi keadilan, mayoritas nelayan merasa sistem ini adil atau sangat adil. Meskipun beberapa nelayan menghadapi kendala teknis, mayoritas besar tetap dapat beradaptasi tanpa kesulitan. Sebagian besar responden menganggap pungutan ini berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mereka, dan mayoritas merasa didukung oleh pemerintah, meskipun ada usulan perbaikan fasilitas, pengurangan persentase PNBP, dan penyesuaian harga acuan ikan.

Daftar Pustaka

Amriwan, A. (2021). Dinamika Dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Plabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 244–263. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v23i2.164>

- Azizah, L. N. (2024). Pengembangan Kapasitas Komunitas Nelayan Bagan Dan Lingkungan Sosialnya Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 39–52. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.27>
- Choirunnisa, L. A. D., Purwaningsih, Y., & Prasetyani, D. (2022). Adaptasi Nelayan Pesisir Kabupaten Pacitan Akibat Perubahan Iklim. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 10(2), 166–181. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.2.166-181>
- Firdaus, M., & Rahadian, R. (2016). PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 241. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1263>
- Luhur, E. S., & Tajerin, T. (2016). Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Kinerja Ekspor Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(2), 185. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i2.3833>
- Maharani, D. P. (2023). Pengaruh Digital Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kawasan Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *Ecoplan*, 6(2), 145–154. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.676>
- Marwah, S. (2021). Dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jami Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 2(1), 93–105. <https://doi.org/10.46510/jami.v2i1.62>
- Megawanto, R., Fauzi, A., Adrianto, L., & Hidayat, A. (2020). Variabel-Variabel Yang Berperan Penting Dalam Sistem Perikanan Tangkap Nasional. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(2), 519–542. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v12i2.28513>
- Mira, M., Rahadian, R., & Zulham, A. (2016). Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kinerja Sektor Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 169. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v9i2.1219>
- Mustaruddin, Asnil, & Nugraha, A. (2021). Sistem Informasi Perikanan Tangkap D.I. Yogyakarta: Pengembangan Basis Data Lingkungan, Produksi, Dan Sistem Keputusan Penangkapan Ikan. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 097–107. <https://doi.org/10.29244/core.4.1.097-107>
- Nababan, B., Wiyono, E. S., & Mustaruddin, M. (2017). Pengkajian Tentang Perikanan Berkelanjutan Di Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jppi.23.1.2017.1-10>
- Nurlaela, E. (2023). *Penangkapan Ikan Terukur: Tantangan Dan Penerapan*. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c759>
- Prasetyo, A., Wiyono, E. S., & Santoso, A. I. (2022). Tingkat Kepentingan Fasilitas Pelabuhan Dan Persepsi Nelayan Terhadap Keputusan Untuk Mendaratkan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Dagho Kepulauan Sangehe. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 5(2), 161–172. <https://doi.org/10.29244/core.5.2.161-172>
- Puspitawati, H., Putri, A. C. J., Titipani, A., & Khasanah, M. N. (2019). Kontribusi Ekonomi Perempuan, Tekanan Ekonomi Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(2), 87–99. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>
- Ramli, R. (2021). Analisis Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Situbondo Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 81–98. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v2i2.81-98>

- Ridha, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Idi Rayeuk. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 646–652. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.205>
- Safira, R. L., Prasiwi, R. R. I., Julia, A., & Putra, N. R. (2022). Kesiapan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pelabuhan Di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 296. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.59327>
- Sriyono, S., & Dewi, S. R. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharobah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>
- Sudarmo, A. P., Baskoro, M. S., Wiryawan, B., Wiyono, E. S., & Monintja, D. R. (2016). Perikanan Skala Kecil: Proses Pengambilan Keputusan Nelayan Dalam Kaitannya Dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penangkapan Ikan (Small-Scale Fishing: Fishers Decision-Making in Relation to Fishing Factors in Conserving Sustainability of Fishing). *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 4(2), 195–200. <https://doi.org/10.29244/jmf.4.2.195-200>
- Tasabaramo, I. A. (2023). Pelatihan Pengolahan Abon Ikan Berbahan Dasar Ikan Padang Lamun (Katamba (*Lethrinus Lentjan*)) Pada Koperasi Produsen Pesisir Nelayan Sejahtera Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. *Jurnal Abdi Insani*, 10(4), 2429–2437. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i4.1200>
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 1, 1. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>
- Vibriyanti, D. (2019). Analisis Deskriptif Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Tangkap (Studi Kasus: Kota Kendari). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 69. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i1.7440>
- Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Zakaria. (2024). Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Pelabuhan Dinas Perhubungan Di Kepulauan Seribu. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 46–60. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.7703>